

02 **Government**
Pemerintah Targetkan Rp3,8 Triliun

05 **PILKADA**
Dua PJ Kepala Daerah di Diganti, Ada Apa?

08 **FAMILY**
Manfaat Makan 2 Kurma Setiap Hari



PATRICK KLUIVERT DATANG Target Lolos Piala Dunia 2026 Mengadang

Pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluyvert resmi diperkenalkan ke publik lewat konferensi pers di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu (12/1/2025). Dia mendapat kontrak dari PSSI selama dua tahun dengan opsi perpanjangan dua tahun. "Jadi ada dua fase, pertama jangka pendek di mana saya masuk sebagai kepala pelatih saat timnas Indonesia berada di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka fokusnya mendapatkan poin melawan Australia dan Bahrain," katanya. (Foto screenshot PSSI TV)

Defisit BPJS Kesehatan

- Angka defisit keuangan BPJS mencapai lebih dari Rp20 triliun pada November 2024
- Penyebab utama defisit adalah utilisasi pelayanan kesehatan yang meningkat dari 252 ribu per hari menjadi 1,7 juta utilisasi per hari saat ini
- Terjadi peningkatan kasus dengan biaya tinggi seperti: hipertensi, diabetes, dan kanker yang mencapai Rp34,7 triliun pada 2023
- Aset neto Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan pada 2023 tercatat surplus Rp57,76 triliun dan mengalami sedikit penurunan jadi Rp52 triliun pada 2024

Tarif BPJS Kesehatan bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPJU) dan peserta bukan pekerja (BP) atau peserta mandiri yang berlaku saat ini:

Kategori	Tarif BPJS
Kelas 1	Rp 150 Ribu Per Orang/Bulan
Kelas 2	Rp 100 Ribu Per Orang/Bulan
Kelas 3	Rp 35 Ribu Per Orang/Bulan

Dalam Perpres 59/2024, tepatnya pada pasal 1038 ayat (1), ditetapkan bahwa penyerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) harus dilakukan secara menyeluruh, dan paling lambat pada:

30 Juni 2025



TUMPUKAN SAMBATAN SOAL BPJS KESEHATAN

Layanan Lambat, Obat Kosong hingga Defisit Rp 20 Triliun

Daftar sambatan (keluhan, Red) warga terkait BPJS Kesehatan makin panjang. Dimulai saat BPJS Kesehatan merilis ada 144 penyakit yang diklaim tidak bisa langsung dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). Nantinya, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang didiagnosis terkena penyakit tersebut mau tidak mau harus mendapatkan pengobatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Sorotan masyarakat makin mencuat kala viral pernyataan pegawai BPJS Kesehatan yang mengaku menggunakan asuransi swasta untuk berobat. Meski tidak menyebutkan nama pegawai, akun tersebut mengaku menggunakan asuransi non-BPJS Kesehatan karena kecepatan pelayanan. Warganet juga ramai membahas unggahan soal kenapa stok obat pasien BPJS Kesehatan sering kosong. Disebutkan bahwa alasan stok obat pasien BPJS Kesehatan sering kosong adalah karena pembayaran klaim BPJS Kesehatan ke rumah sakit seringkali tidak tepat waktu. Terbaru peringatan datang dari wakil rakyat atau DPR RI. Pemerintah diminta mengantisipasi defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan mencapai Rp20 triliun pada 2024. Bila kondisi ini berlanjut di akan muncul risiko memicu gagal bayar.

Cukai Minuman Berpemanis Dimulai Pertengahan 2025 Pemerintah Targetkan Rp3,8 Triliun

JAKARTA- Pemerintah menargetkan implementasi pemungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau cukai MBDK berlaku pada semester kedua 2025 atau pertengahan tahun ini. Penerimaan negara dari penerapan pungutan ini ditargetkan Rp3,8 triliun.

Rencana penerapan cukai MBDK tahun ini dipaparkan oleh Kepala Sub Direktorat Tarif Cukai dan Harga Dasar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Akbar Harfianto. "Saat ini target untuk implementasi memang sesuai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di semester kedua," ujar Akbar dikutip Minggu (12/1/2025).

Wacana penenaan cukai MBDK sudah bergulir sejak beberapa tahun belakangan. Pada 2020 DPR melalui komisi XI telah menyetujui penambahan MBDK dan plastik sebagai objek cukai baru. Tahun 2023 target penerimaan cukai untuk 2024 bahkan telah diproyeksikan yakni sebesar Rp4,3 triliun, namun belum juga terlaksana.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah menargetkan total penerimaan negara dari cukai Rp244,19 triliun. Jumlah tersebut berasal dari penerimaan cukai hasil tembakau sebesar Rp230 triliun, cukai dari ethyl alkohol dan minuman mengandung ethyl alkohol Rp10,3 triliun, serta cukai MBDK Rp3,8 triliun.

Sebelumnya, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan ada proses panjang yang harus dilalui untuk menetapkan barang kena cukai (BKC). Bahkan tahun 2023 walaupun target pendapatan cukai sudah dicantumkan, target penerimaan dihapus melalui Peraturan Presiden 75 tahun 2023.

Nirwala menerangkan, Kementerian telah siap menerapkan pungutan namun selama ini masih terjadi tarik ulur karena perekonomian belum mendukung. Pemungutan akan resmi dilakukan jika pemerintah sudah menyiapkan aturan-aturan teknis seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan aturan turunannya.

Pemerintah saat ini masih menggodok batasan kadar gula tambahan yang akan dikenakan pungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan.

Nirwala mengatakan, batasan kadar gula tersebut nantinya akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Karena prinsip kata kuncinya



(Ilustrasi) Cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau cukai MBDK berlaku pada semester kedua 2025. (Dok)

adalah mengendalikan konsumsi gula tambahan, tentunya kita akan pasang threshold. Ya thresholdnya seberapa nanti masih digodok, akan dibahas di PP-nya," kata Nirwala.

Dalam hal ini, jika kandungan gula di bawah threshold maka tidak akan kena cukai MBDK. Begitu juga sebaliknya.

Tidak hanya itu, Nirwala juga menambahkan bahwa kebijakan tersebut juga harus dilengkapi dengan aturan jelas, termasuk definisi barang kena cukai MBDK, kriteria minuman yang dikenakan cukai dan yang dibebaskan, hingga mekanisme pembebasan dan pengawasan atas BKC.

Nirwala menjelaskan bahwa penerapan cukai MBDK ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi gula tambahan yang berisiko bagi kesehatan masyarakat.

Pemerintah juga tengah melakukan studi komparatif dan pendekatan ATM (Amati, Tiru, Modifikasi) untuk memastikan kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia.

Ekonom Prediksi Tak Sampai Rp 7 T

Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda memperkirakan, potensi penerimaan negara dari rencana kebijakan tarif cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) tidak sampai Rp 7 triliun.

Pasalnya, Huda melihat, dampak penenaan cukai terhadap minuman berpemanis relatif kecil terhadap penerimaan negara, tetapi lebih kepada pengendalian konsumsi di sektor kesehatan.

"Dampaknya relatif kecil terhadap penerimaan negara, tidak ada Rp 7 triliun potensi ke penerimaan negara," jelas Nailul Huda, Minggu (12/1/2025).

"Selama ini minuman berpemanis dalam kemasan memang menjadi penyakit yang belum ada kebijakan dalam mengontrol konsumsinya. Cukai MBDK bisa menjadi

jawabannya," katanya.

Lebih lanjut, Huda berpendapat sebaiknya pemerintah menggunakan perhitungan tarif ad valorem progresif dengan besaran tarif mengikuti kandungan gula yang terdapat dalam MBDK.

Tarif ad valorem yaitu pajak yang didasarkan pada nilai suatu transaksi. "Semakin tinggi tingkat kandungan gula maka semakin tinggi pula tarif yang diberikan kepada produsen MBDK," tutur Huda.

Di sisi lain, Analisis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani mengatakan, pemerintah mesti meng-exercise lebih lanjut terkait penerapan tarif cukai MBDK ini sebelum akhirnya diketok palu.

"Pemerintah mesti meng-exercise lebih lanjut tentang penerapan cukai minuman berpemanis ini," kata Ajib kepada kumparan, Minggu (12/1).

Kata dia, tujuan pemerintah memberikan tarif cukai di dalam MBDK harus jelas, apakah untuk mengisi kebutuhan budgeting/plot fiskal saja atau sekadar mengatur konsumsi minuman berpemanis di masyarakat.

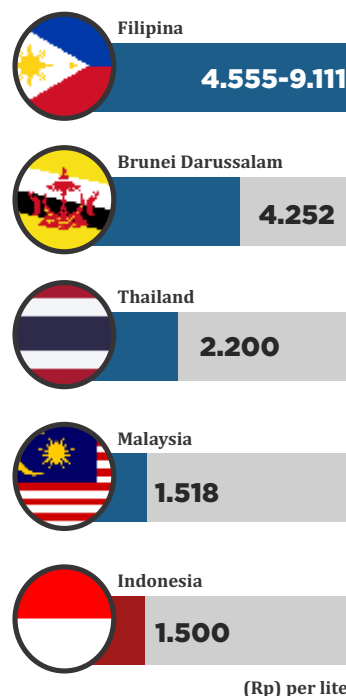
"Kan ada 2 ukuran yang bisa dipakai pemerintah, satu apakah buat sekadar kebutuhan budgeting atau kebutuhan plot fiskal, sebenarnya kalau kita lihat dari 2024 target cukai itu overtarget, atau kedua untuk mengatur konsumsi minuman berpemanis, itu yang perlu dievaluasi," imbuhnya.

Jikalau tujuannya ingin mengatur dan berorientasi kepada kesehatan masyarakat, menurut Ajib hal itu sesuatu yang bagus.

"Jadi kalau tujuannya secara prinsip mengatur, dan orientasi kepada kesehatan masyarakat ya itu memang bagus," ucap Ajib.

Tetapi, kata dia dalam konteks perekonomian, di tahun 2025 sedang banyak disinsentif fiskal termasuk regulasi yang mulai berlaku, sebut saja kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, sistem inti administrasi perpajakan (coretax)

TARIF CUKAI MBDKDI NEGARA LAIN (PER LITER)



yang baru, hingga adanya opsen pajak kendaraan bermotor.

"Dalam konteks ekonomi, sekarang ini kan lagi banyak disinsentif fiskal termasuk regulasi yang banyak mulai banyak berlaku di 2025 seperti PPN 12 persen, kemudian bicara coretax secara umum, kemudian opsen pajak kendaraan bermotor yang dikenakan kan rata-ratanya naik di daerah," jelas dia.

Menurutnya, pemerintah mesti sedikit menunggu waktu yang lebih tepat untuk mengenakan cukai atas Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), tak harus di semester II 2025.

Dalam kesempatannya, Ajib menjelaskan, sebetulnya dari sisi penerimaan, rencana cukai berpemanis tak terlalu signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kita belum ada kajian yang lebih detail tentang potensi penerimaannya. Tapi, sekitar 90 persen cukai ditopang oleh tembakau sebenarnya. Jadi lebih baik pemerintah fokus pada sektor penopang penerimaan cukai yang lebih signifikan," kata Ajib. (din, bis, ant, ist/dya)

Pagar Laut di Tangerang Diklaim Swadaya Warga DPR RI: Tidak Masuk Akal

JAKARTA-Nelayan yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Pantura (JRP) Kabupaten Tangerang, Banten, mengklaim pagar bambu yang terbentang di laut pantai utara (Pantura) di daerah itu dibangun oleh masyarakat setempat secara swadaya.

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menyebut klaim itu tak masuk akal. Jika pagar laut tersebut dibuat masyarakat tentu akan menyulitkan dan merugikan masyarakat itu sendiri dalam melaut.

"Kalau masyarakat yang buat, tidak mungkin menghalangi akses mereka untuk melaut. Jadi alasan itu sangat tidak masuk akal," kata Johan, Minggu (12/1/2025).

Johan menduga pagar laut akan dikondisikan untuk reklamasi di sekitar wilayah di Kabupaten Tangerang. Namun, ia mengatakan perlu diselidiki lebih lanjut untuk memastikan alasan dibuatnya pagar laut tersebut.

"Kalau menurut dugaan saya ini adalah pra-kondisi atau rekayasa gelombang, sebagai persiapan untuk kegiatan reklamasi. Namun begitu, saya tidak ingin terlalu berspekulasi. Biarlah KKP dan Ombudsman bekerja dulu sambil kita tunggu masa tunggu 20 hari pasca penyegelan kemarin," katanya.

Johan mengatakan pertemuan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan itu telah dibahas di internal Komisi IV.

"Komisi 4 dalam diskusi di group karena saat ini masih dalam masa reses berencana akan memanggil KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)," kata Johan.

Namun demikian, Johan mengaku pertemuan dengan KKP masih belum ditentukan. Rencananya saat masa sidang pertama, Komisi IV akan melayangkan pemanggilan.

Senada, Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menilai pelaku atau pemasang pagar laut tersebut harus diusut karena telah melanggar penggunaan wilayah ruang laut.

"Kita mau nyari siapa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan ruang wilayah laut, ini punya potensi pelanggaran penggunaan wilayah ruang laut. Mau kita cek dan mau kita selidiki siapa yang melakukan ini," kata Riyono melalui keterangannya, Minggu (12/1/2025).

Riyono mengajak instansi terkait untuk menyelidiki hal tersebut. "Kawan-kawan di Pemprov, teman-teman di KKP ayo kita lihat dengan sejujur-jujurnya."

Riyono mengatakan dirinya mengecek pemagaran laut itu berada di wilayah laut Kabupaten Tangerang, Banten. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten menerangkan pagar laut terbuat dari bambu atau cerucuk dengan ketinggian rata-rata 6 meter. Di atasnya, dipasang anyaman bambu, paranet, dan juga diberikan



Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyetop aktivitas pemagaran laut ilegal di wilayah pesisir Tangerang, Banten. (Dok.KKP)

pemberat berupa karung berisi pasir.

"Siapa pun dia, dia harus mempertanggungjawabkan. Ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia laut untuk nelayan," ujar Riyono.

Menurut Riyono, pemagaran laut tersebut merugikan nelayan, karena harus memutar saat pergi melaut atau kembali. "Kemudian pasti solarnya juga akan tambah. Oleh karena itu kita akan coba, kita akan usaha bagaimana kemudian mereka mempertanggungjawabkannya," kata Riyono.

Disebut untuk Cegah Abrasi

Sebelumnya, Kelompok Nelayan

yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Pantura (JRP) menyatakan tanggul laut atau yang kini populer disebut pagar laut yang membentang di pesisir utara Tangerang sengaja dibangun secara swadaya oleh masyarakat dengan tujuan utama sebagai pemecah ombak, pencegah abrasi serta mitigasi terhadap ancaman Megathrust dan Tsunami.

"Tanggul ini merupakan hasil inisiatif swadaya dari masyarakat setempat," ujar perwakilan nelayan Tarsin, Sabtu (11/1/2025).

Tarsin mengatakan, opini pembangunan pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang yang saat ini ramai tidak benar. "Ini bukan

pemagaran. Tapi tanggul laut yang fungsinya sangat banyak," ujarnya. Dia berharap pemerintah bisa meluruskan opini negatif yang berkembang dan seolah merugikan nelayan. "Kami nelayan di sini aman aman dan nyaman nyaman saja," ujarnya.

Tarsin menjelaskan, tanggul laut adalah struktur fisik yang memiliki fungsi penting, antara lain, mengurangi dampak gelombang besar yang melindungi wilayah pesisir dari ombak tinggi yang dapat mengikis pantai dan merusak infrastruktur.

Tanggul laut juga berfungsi mencegah abrasi, pengikisan tanah di wilayah pantai, yang dapat merugikan ekosistem dan permukiman. "Tanggul juga untuk mitigasi ancaman tsunami. Meski tidak bisa sepenuhnya menahan tsunami, tanggul laut membantu mengurangi energi gelombang hingga dampaknya lebih kecil di pesisir," kata Tarsin.

Dengan kondisi tanggul laut yang baik, ujar Tarsin, maka area di sekitarnya dapat dimanfaatkan sebagai tambak ikan. Hal ini memberikan peluang ekonomi baru, meningkatkan produksi perikanan dan membantu kesejahteraan masyarakat setempat. "Tambak ikan di dekat tanggul juga dapat dikelola secara berkelanjutan untuk menjaga ekosistem tetap seimbang," kata dia. (Din, ist, rls, kum/dya)

Kerugian Nelayan Diperkirakan Rp 16 Miliar

SEBELUMNYA, Ombudsman Republik Indonesia menyatakan pagar laut ilegal di perairan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten telah merugikan nelayan sekitar. Waktu tempuh yang nelayan perlukan untuk melaut bertambah lama akibat pagar laut dari bilah-bilah bambu sepanjang 30,16 kilometer itu.

Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, mengatakan informasi tersebut merupakan temuan dari pengecekan lapangan yang dia lakukan pada Desember 2024 lalu. Yeka sempat mengunjungi Kecamatan Kronjo dan sejumlah wilayah lainnya yang berada di pesisir tempat pagar laut itu berdiri.

Yeka menyampaikan para nelayan mengeluhkan karena perjalanan untuk melaut menjadi sulit akibat pagar di tengah-tengah laut. Kapal nelayan harus mengambil jalan memutar agar bisa ke laut lepas. "Nelayan itu keluhannya, sekarang kalau mau melaut bisa satu jam, satu setengah jam, mutar-mutar dulu mencari lubang sebelum melaut itu. Kenapa? Karena dipagar," kata dia melalui sambungan telepon.

Ia mengatakan kondisi tersebut

membuat para nelayan merugi. Sebab, mereka harus mengeluarkan biaya lebih untuk bahan bakar kapal mereka. Selain itu, para nelayan juga tidak bisa menggunakan waktu satu setengah jam yang hilang di perjalanan dengan produktif. Sebagian nelayan juga tidak melaut akibat adanya pagar tersebut.

Ombudsman memperkirakan keberadaan pagar laut itu menimbulkan kerugian hingga belasan miliar rupiah. "Total itu Rp 16 miliar lah, selama ada kasus itu. Potensi kerugiannya segitu," ucap dia.

Pagar laut itu kini telah disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Penyegelan itu berlangsung pada Kamis, 9 Januari 2025. KKP memberikan waktu 20 hari bagi pembangun dan pemilik pagar tersebut untuk membongkar sendiri bangunan yang mereka buat tanpa izin itu. KKP masih berupaya mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut tersebut.

Pagar laut ilegal yang disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan itu melintasi pesisir 16

desa di enam kecamatan di Kabupaten Tangerang. Pagar tersebut membentang di wilayah tiga desa di Kecamatan Kronjo, tiga wilayah desa di Kecamatan Kemiri, empat wilayah desa di Kecamatan Mauk, satu wilayah desa di Kecamatan Sukadiri, tiga wilayah desa di Kecamatan Pakuhaji, dan dua wilayah desa di Kecamatan Teluknaga.

Terpisah, Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda menilai pemagaran laut tersebut berpotensi melanggar hukum. Ia mengatakan pihak berwajib harus melakukan penyelidikan lebih lanjut soal siapa aktor intelektual xi balik pagar laut tersebut.

"Ya tentu (langgar hukum), karena itu kegiatan berdampak pada lingkungan. Harus ada izin dan mengantongi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)," katanya.

Pemerintah setempat juga dicurigai sebenarnya tahu ada pihak yang dengan sengaja memasang pagar di laut dengan panjang mencapai 30 km. (din, ist, rls/dya)

Babak Baru Korupsi Dana Hibah Jatim KPK Sita Properti Senilai Rp8,1 Miliar

JAKARTA - Penyidikan dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022 memasuki babak baru. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita empat properti dengan nilai Rp8,1 miliar.

"Pada tanggal 8 Januari 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penyitaan tiga unit tanah dan bangunan yang berlokasi di Surabaya dan satu unit apartemen yang berlokasi di Malang, yang secara keseluruhan bernilai Rp8,1 miliar," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Tessa mengatakan penyitaan dilakukan karena diduga aset-aset tersebut diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi tersebut di atas.

KPK akan berupaya semaksimal mungkin mengembangkan perkara yang sedang disidik dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawabannya.

KPK pada Jumat, 12 Juli 2024, mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan dugaan korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat

(pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021-2022.

"Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan disampaikan pada waktunya bilamana penyidikan dianggap cukup," ujar Tessa.

Dari 21 orang tersangka tersebut, empat orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan 17 orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap.

Dari empat tersangka penerima suap, lanjut dia, tiga orang merupakan penyelenggara negara, sementara satu orang lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara.

Untuk 17 orang tersangka pemberi suap, sebanyak 15 orang di antaranya adalah pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara.

Juru bicara sekaligus penyidik KPK itu menerangkan bahwa penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2024.

"Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari perkara OTT (operasi tangkap tangan) terhadap STPS (Sahat Tua P. Simanjuntak) yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan kawan-kawan oleh KPK pada bulan

4 Orang yang Sudah Divonis Bersalah



Eks Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simanjuntak divonis pidana penjara 9 tahun dan membayar uang pengganti Rp 39,5 miliar.



Ajudan Sahat, Rusdi divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidi 3 bulan. Rusdi berperan sebagai perantara uang suap terkait dana hibah pokir sejumlah Rp 2,750 miliar dari Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi untuk Sahat.



Hamid dan Ilham selaku penyupat lewat 'sistem ijon' alias uang diberikan terlebih dahulu sebelum alokasi hibah turun, masing-masing divonis 2 tahun 6 bulan penjara.



Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto

dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur 2021-2022.

Anwar Sadad diperiksa KPK dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024. Hal yang sama juga dialami penyidik KPK terhadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 Achmad Iskandar.

"Saksi didalami terkait pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2021-2022 dan kepemilikan aset mereka," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (9/1/2025). (pra, ist, ant/dya)

September 2022," kata Tessa.

Dalam perkara tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya memvonis Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P. Simanjuntak selama 9 tahun penjara dalam kasus korupsi hibah pokok pikiran (pokir) DPRD Jatim pada tahun anggaran 2021-2022.

KPK juga memeriksa Anggota DPR RI Anwar Sadar (AS) soal kepemilikan asetnya dan juga soal pengurusan

Jepang Akan Berikan Pelatihan dan Tenaga Ahli Bantu Makan Bergizi Gratis



Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/1/2025). (dok.setpres)

JAKARTA - Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengatakan Jepang akan menyediakan pelatihan dan tenaga ahli untuk membantu program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Ishiba saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (11/1/2025).

"Untuk mengakomodir keinginan besar Presiden Prabowo untuk menyediakan makan bergizi tinggi

untuk anak-anak di Indonesia, Jepang akan menyelenggarakan paket kerja sama, termasuk pelatihan penyediaan makan siang sekolah dan pengiriman tenaga ahli," kata Ishiba dalam pernyataan bersama.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan Jepang berminat untuk membantu program makan bergizi gratis yang telah diluncurkan dalam sepekan terakhir.

Prabowo mengatakan Jepang memiliki pengalaman program makan bergizi selama 80 tahun. Sehingga Jepang memiliki kemampuan di bidang tersebut. "Mereka menawarkan inisiatif mereka untuk ikut membantu mungkin dengan pelatihan, dan lain

sebagainya," kata Prabowo.

Selain makan bergizi gratis, Prabowo juga mengajak Jepang mendukung industrialisasi Indonesia, terutama di bidang hilirisasi. Jepang, kata Prabowo, juga tertarik di bidang pangan, maritim, energi, hingga perikanan.

"Kami sekali lagi sangat berterima kasih atas kunjungan ini, dan kami yakin bahwa ini tanda awal dari kerja sama yang lebih baik lagi," ujar Prabowo.

Temuan Sayur Basi

Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) merespon temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait indikasi sayur basi di Makan Bergizi Gratis (MBG).

BGN mengklaim, pihaknya akan melakukan evaluasi lanjutan untuk perbaikan kualitas dan kepastian gizi terhadap makanan sebelum disalurkan kepada penerima manfaat.

"Kami evaluasi tiap hari dan keluhan dijadikan acuan untuk

perbaikan," kata Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana Minggu (12/1/2025).

Dadan menjelaskan, saat ini program masih berjalan di tahap awal, sehingga evaluasi dan masukan akan menjadi bahan pertimbangan untuk perbaikan di tahap lanjutan.

"Dengan berjalannya waktu, pelayanan akan makin cepat, makin tepat waktu, makin baik, dan makin menyesuaikan dengan selera," jelasnya.

Lebih dari itu, Dadan membantah pelaksanaan program makan bergizi gratis ini tidak melibatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dadan menegaskan, pihaknya memberikan ruang bagi pelaku usaha dari berbagai macam skala asal selaras dengan syarat yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

"Semua pihak terbuka, yang penting dapat ikut melayani dengan kualitas yang sesuai pedoman," jelas Dadan. (din, rla, ist, ant/dya)

Problematika Hukum Pelantikan Kepala Daerah Berpeluang Tak Serentak, Usai Reses DPR Panggil Mendagri hingga KPU



Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda

JAKARTA- Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 22 Januari 2025 atau setelah masa reses berakhir.

Mereka akan membahas opsi pelantikan kepala daerah. Diketahui, mencuat wacana agar kepala daerah dilantik secara bertahap, tidak serentak.

Pasalnya, ada beberapa kepala daerah terpilih yang masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). "Komisi II DPR RI akan segera mengundang saudara Mendagri, KPU, Bawaslu, DKPP untuk rumuskan opsi-opsi pelantikan sebagaimana yang kita tahu. Kami rencana mengundang mereka pada tanggal 22 Januari yang akan datang begitu masa sidang dibuka di DPR RI," ujar Rifqi Minggu (12/1/2025).

Rifqi mengakui, terkait pelantikan kepala daerah secara serentak, terdapat dilema atau problematika hukum.

Sebab, berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 Tahun 2024, pelantikan baru bisa dilaksanakan setelah seluruh sengketa di MK selesai atau telah mendapatkan putusan yang

berkekuatan hukum.

Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi mereka yang akan melaksanakan pemilihan ulang, pemungutan suara ulang, perhitungan suara ulang, atau pengulangan pilkada karena adanya keadaan mendesak (force majeure).

"Di sisi lain, UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 160 dan 160a menyebutkan bahwa tahapan pelantikan itu adalah suatu konsekuensi dari penetapan yang telah dilakukan oleh KPU di provinsi/kabupaten/kota yang waktunya telah diatur sedemikian rupa, sehingga kalau menunggu putusan MK usai semua pada sekitar pertengahan Maret 2025 maka ada kecenderungan juga melanggar ketentuan 2 pasal UU itu," paparnya.

Sementara itu, Rifqi juga membeberkan opsi pelantikan kepala daerah yang bisa dilakukan. Opsi pertama adalah pelantikan serentak, yang artinya pelantikannya baru bisa digelar setelah seluruh putusan MK berkekuatan hukum pada 13 Maret 2025. Opsi kedua, pelantikan serentak hanya dilakukan kepada kepala daerah terpilih yang tidak

bersengketa.

"Sesuai dengan Perpres yang ada, (pelantikan) pada tanggal 7 Februari untuk gubernur dan pada tanggal 10 Februari untuk bupati dan wali kota. Dan serentak untuk mereka yang bersengketa sesuai dengan putusan MK apakah mereka akan lakukan PSU penghitungan ulang dan seterusnya setelah nanti putusan itu kita dapatkan," imbuh Rifqi.

Pemerintah tengah mengkaji opsi kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi bisa dilantik terlebih dulu. Opsi ini dibahas antara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Yusril Ihza Mahendra dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (10/1/2025) siang.

"Pemerintah berkeinginan supaya mudah-mudahan smooth ya, sengketa ini jalan terus di MK, tetapi yang tidak ada sengketa ya bisa dipertimbangkan untuk di bagaimana, apakah dilantik lebih dulu," kata Yusril usai bertemu Prasetyo. (ist, din, kom/dya)

Jelang Pilkada Ulang di Bangka Belitung Dua Pj Kepala Daerah di Diganti, Ada Apa?

BANGKA-Jelang pilkada ulang di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka, dua pejabat kepala daerah di wilayah di Bangka Belitung tersebut justru diganti.

Kedua pejabat atau Pj kepala daerah yang di ganti tersebut, yakni Pj Bupati Bangka Muhammad Haris dan Pj Wali Kota Pangkalpinang Budi Utama.

Untuk diketahui, dua Pj Kepala daerah di Bangka Belitung yang digantikan tersebut merupakan Pj kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada ulang di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. Sebab, pada Pilkada serentak 2024 lalu, kotak kosong memimpin perolehan suara di kedua wilayah tersebut mengalahkan calon tunggal.

Pergantian dua Pj kepala daerah tersebut dibenarkan oleh Pj Gubernur Bangka Belitung Sugito, Minggu (12/1/2025) "Ya memang benar Pj Bupati Bangka dan Pj Wali Kota Pangkalpinang diganti," kata Sugito.

Rencananya, menurut Sugito, dua pengisi jabatan Pj kepala daerah itu akan dilantik Senin, di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur Bangka

Belitung. "Insya Allah Senin (13/1/2025) pelantikan," ujarnya.

Hanya saja Sugito enggan menyebutkan siapa nama dua Pj yang akan menggantikan Pj Bupati Bangka dan Pj Wali Kota Pangkalpinang. "Rahasia, nanti Senin pasti tahu siapa penggantinya," imbuhnya.

Namun dari informasi yang diterima, untuk pengganti Pj Bupati Bangka Muhammad Haris adalah Isnaini, Direktur Keuangan KPK. Sedangkan untuk Pj Wali Kota Pangkalpinang Budi Utama digantikan oleh M Unu Ibnudin, Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah (BPPT) di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Coblosan 27 Agustus 2025

Terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/ Kota di Bangka Belitung (Babel) menggelar rapat pleno penetapan. Hasilnya, Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka akan melangsungkan Pilkada ulang.

Pilkada ulang tersebut merupakan tuntutan dari paslon tunggal atau petahana yang kalah suara dari kotak kosong. Mereka paslon Bupati Bangka dan Wakilnya Mulkan dan Ramadian. Selanjutnya, pasangan Walikota dan Wakilnya Maulan Akil dan Masagus M Hakim.

Paslon ini hanya meriah suara di bawah 50 persen di Pilwakot dan Pilbup di 2024. Rapat pleno penetapan dilaksanakan secara serentak di KPU Kabupaten/Kota di Babel yang tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Untuk Babel terdiri dari 5 Kabupaten/Kota yang sudah melaksanakan rapat pleno penetapan," kata Ketua KPU Babel Husin.

Lima KPU daerah yang telah melangsungkan rapat pleno penetapan yakni Bangka Selatan



Ketua KPU Bangka Belitung Husin

(Basel), Bangka Tengah (Bateng), Belitung, Pangkalpinang, dan Bangka. Tiga daerah diantaranya adalah penetapan paslon kepala daerah terpilih.

"Untuk di Basel, Bateng dan Belitung adalah penetapan paslon terpilih. Sedangkan untuk Pangkalpinang dan Bangka penetapan Pilkada ulang," ungkap Husin. (din, ant, rls/dya)

29 Sapi Mati dari 152 Kasus PMK Kabupaten Malang Peternak Diminta Mandiri Tangani Wabah

MALANG- Sebanyak 152 ekor sapi di Kabupaten Malang dilaporkan terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sejak Oktober 2024 hingga Januari 2025. Data terbaru menyebutkan, 29 ekor diantaranya mati.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menekankan pentingnya peran peternak untuk melakukan vaksinasi mandiri. Peralasan ada keterbatasan dosis vaksin yang tersedia dari pemerintah pusat. Langkah ini juga dinilai krusial untuk mencegah meluasnya penyebaran virus di wilayah Kabupaten Malang.

"Kami terus berupaya agar para peternak di Kabupaten Malang dapat melakukan vaksinasi mandiri untuk melindungi hewan ternaknya dari virus PMK," ujar Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten Malang, Eko Wahyu Widodo, Minggu (12/1/2025).

Eko menjelaskan, pihaknya mendorong peternak yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) persusuan atau kelompok peternak untuk membeli vaksin secara mandiri. Meski begitu, DPKH tetap siap memberikan dukungan berupa tenaga vaksinasi bagi peternak yang membutuhkan.

Lebih lanjut, Eko menyebutkan harga vaksin PMK cukup bervariasi. Mulai dari Rp 17.100 hingga Rp 25.300 per dosis, belum termasuk ongkos pengiriman dan jasa vaksinasi.

"Paling naik sampai Rp 20 ribu untuk ongkir dan pengepakan. Untuk satu dosis, tidak ada tambahan lain. Kalau vaksin ya vaksin saja, tidak boleh ada yang ditambahkan," jelasnya.

Saat ini, menurutnya Pemkab Malang juga masih menunggu distribusi bantuan vaksin dari Kementerian Pertanian RI dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meski demikian, beberapa peternak diakui telah melakukan vaksinasi mandiri.

Untuk diketahui, penularan wabah PMK ini, kata Eko, mulai kembali terjadi sejak Oktober 2024. Hingga kini, pihaknya telah melakukan berbagai langkah pengobatan untuk sapi-sapi yang masih terpapar virus tersebut.

Dari 152 kasus yang tercatat, sebagian besar sapi masih dalam kondisi sakit, namun perlahan mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Menurut Eko, kasus-kasus tersebut tersebar di 19 kecamatan, dengan mayoritas menyerang sapi potong atau sapi pedaging. "Daya kurang

hapal, ya. Tapi intinya tersebar di 19 kecamatan itu. Seperti di Kecamatan Lawang, Dau, kemudian di Ngajum, Pagak, dan di Pakis," tutupnya.

Sementara itu, Bupati Malang, Sanusi, juga telah meminta para peternak untuk lebih peduli terhadap kesehatan hewan ternaknya dengan tidak selalu bergantung pada bantuan vaksin dari pemerintah. Menurutnya, vaksinasi mandiri merupakan langkah penting untuk mencegah penyebaran wabah sejak dini.

"Ke depan, memang seharusnya tidak perlu menunggu bantuan dari dinas peternakan. Peternak harus bisa melakukan vaksinasi PMK secara mandiri untuk menjaga ternaknya sendiri," kata Sanusi.

Sanusi juga menyoroti keterbatasan jumlah vaksin yang disediakan pemerintah pusat. Dari total empat juta dosis vaksin PMK yang disiapkan Kementerian Pertanian RI, jumlah ini menurutnya masih belum



Peternak sapi di wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. (Santi/Lenteratoday)

mencukupi untuk melindungi lebih dari empat juta sapi yang ada di Indonesia.

"Saat ini kan pemerintah pusat juga sudah menetapkan status siaga satu untuk menghadapi penyebaran virus PMK di Jatim. Nah maka dari itu, untuk yang bisa beli (vaksin) mandiri, kita dorong. Jangan sampai meluas seperti 2 tahun lalu," pungkas Sanusi. (Santi/Dya)

Anggaran Terbatas, Perbaikan Gedung Kesenian Gajayana Hanya Dijatah Rp 200 Juta di 2025



Kondisi kursi-kursi di Gedung Kesenian Gajayana Kota Malang. (Santi/Lenteratoday)

MALANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang hanya dapat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 200 juta untuk perbaikan Gedung Kesenian Gajayana pada tahun 2025 ini.

Dengan keterbatasan dana

tersebut, Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana memutuskan untuk melanjutkan revitalisasi secara bertahap, sesuai dengan anggaran dalam APBD murni 2025.

"Yang jelas di tahun ini kami tidak bisa menganggarkan banyak. Karena kalau mau direvitalisasi sesuai dengan yang diharapkan, itu kan perlu perubahan total. Cuma di sisi lain, kan butuh dana banyak," ujar Suwarjana, Minggu (12/1/2025).

Suwarjana menambahkan, perbaikan yang dilakukan di tahun ini akan difokuskan pada beberapa aspek penting seperti pembenahan atap, perbaikan lantai dua, dan reparasi kursi-kursi antik yang menjadi ciri

khas gedung tersebut.

"Kursinya hanya direparasi, karena itu kan model kursi itu kan termasuk barang antik, kuno, jadi tidak kami ganti. Nah untuk perbaikan itu kami anggarkan sekitar Rp 200 juta di tahun 2025 ini," tambahnya.

Lebih lanjut, Suwarjana juga menjelaskan Gedung Kesenian Gajayana yang merupakan cagar budaya, akan tetap menjadi perhatian utama pemerintah untuk menjaga keaslian desain dan elemen-elemen khasnya.

Diketahui pada tahap pertama tahun 2024 lalu, Pemkot Malang telah menggelontorkan hampir Rp 200 juta untuk memperbaiki atap dan mengecat bagian depan gedung.

"Perbaikan bagian dalam tahun lalu sudah selesai. Insyaallah sekarang sudah clear. Revitalisasi dilakukan secara bertahap, pelan-pelan, meskipun idealnya banyak aspek lain yang perlu dibenahi," jelas Suwarjana.

Suwarjana juga mengakui, sejumlah pegiat seni berharap revitalisasi dapat dilakukan secara menyeluruh.

Menurutnya, pegiat seni menginginkan pembaruan pada tata suara (sound system), pencahayaan (lighting), hingga fasilitas pendukung lainnya.

Namun, Suwarjana menegaskan, anggaran untuk revitalisasi total dapat mencapai Rp 1 miliar.

"Kalau sesuai harapan teman-teman (pegiat seni), pembenahan total ya bisa masuk ke angka Rp 1 miliar. Tapi kalau sekarang ini kami belum bisa merealisasikannya, jadi fokus bertahap dulu," katanya.

Terkait pencahayaan gedung yang dianggap belum optimal, Suwarjana juga menilai kondisinya saat ini sudah cukup baik. Ia menekankan, pencahayaan di panggung menjadi prioritas utama untuk menunjang pertunjukan seni.

"Menurut saya, lighting saat ini sudah bagus, terutama di panggung. Gedung pertunjukan yang baik itu malah gelap saat ada pertunjukan. Jadi, tidak terlalu urgent untuk memperbaiki lighting secara keseluruhan," terangnya. (Santi/Dya)

Kebakaran LA Tewaskan 16 Orang, di Palisades Api Meluas



Citra satelit yang disediakan oleh Maxar Technologies ini menunjukkan kebakaran hutan Eaton di Altadena, Los Angeles, California, AS pada Jumat (10/1/2025).

LOS ANGELES - Jumlah korban tewas akibat kebakaran Los Angeles mencapai 16 orang. Hingga kini, petugas pemadam kebakaran berlomba memadamkan api meski angin bertiup kencang.

Diketahui, petugas pemadam berjuang hingga Sabtu (11/1/2025) malam guna memadamkan api besar di sekitar Los Angeles yang mendorong ke daerah yang sebelumnya tidak tersentuh.

Meskipun telah dilakukan upaya heroik, termasuk pemadaman api dari udara, kebakaran Palisades terus meluas pada Sabtu, bergerak ke arah timur menuju koleksi tak ternilai dari museum seni Getty Center dan ke utara menuju Lembah San Fernando yang padat penduduk.

"Kami sangat takut," kata Sarah Cohen kepada Los Angeles Times tentang ancaman terhadap rumahnya di Tarzana, dikutip dari AFP pada Minggu (12/1/2025).

"Setiap kali mereka menyiramkan air, keadaan membaik. Namun

kemudian memburuk lagi," imbuh dia.

Rekaman dari daerah Mandeville Canyon memperlihatkan satu rumah terbakar, bahkan api terus merembet ke lereng bukit dan mengancam rumah-rumah lainnya.

Menurut para peramal cuaca, angin yang sempat mereda dengan cepat berganti menjadi hembusan angin kencang. Hal itu akan memperparah kobaran api selama beberapa hari ke depan.

"Sayangnya, kondisi cuaca kritis akibat kebakaran akan meningkat lagi hari ini di California selatan dan berlangsung setidaknya hingga awal minggu depan," kata Badan Cuaca Nasional.

"Hal ini dapat menyebabkan penyebaran kebakaran serta munculnya kebakaran baru lagi," imbuhnya.

Kebakaran Palisades berhasil diatasi 11 persen pada Sabtu, tetapi meluas hingga 9.500 hektar, sementara kebakaran Eaton mencapai 14.000 hektar dan 15 persen berhasil diatasi.

Angka resmi menunjukkan lebih dari 12.000 bangunan terbakar, tetapi Todd Hopkins dari Cal Fire mengatakan tidak semuanya adalah rumah, dan jumlah tersebut juga akan mencakup bangunan luar, kendaraan rekreasi, serta gudang.

WNI Terdampak

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Los Angeles, Amerika Serikat (AS) menyatakan sebanyak 97 warga negara Indonesia (WNI) dan beberapa diaspora Indonesia terkena dampak kebakaran hutan wilayah tersebut.

Berdasarkan pantauan KJRI Los Angeles, sebaran mereka meliputi wilayah Pasadena (60 orang), Altadena (20 orang), Sylmar (10 orang), dan Calabasas (7 orang).

"Kami menghimbau masyarakat Indonesia untuk tetap tenang, menjaga perkembangan situasi, dan mematuhi arahan otoritas setempat," ujar Konjen RI dalam keterangan tertulis di laman kemlu.go.id, dikutip Minggu (12/1/2025).

KJRI terus memonitor kondisi para WNI ini dan memastikan mereka mendapatkan bantuan serta perlindungan yang dibutuhkan. Selain itu, dikatakan layanan konsuler dan keimigrasian tetap beroperasi ditengah situasi ini.

KJRI juga siap mengikuti panduan evakuasi dari pemerintah Los Angeles County jika situasi semakin memburuk.

Hingga Kamis sore (9/1/2025), pukul 16.00 waktu Los Angeles, masyarakat Indonesia yang terdampak telah mengikuti Arahan

6 ARTIS INDONESIA YANG TINGGAL DI LOS ANGELES



Uya Kuya

Rumah Uya Kuya terletak di Eaton Canyon, Los Angeles. Kawasan ini cukup jauh dari lokasi kebakaran sehingga tidak terdampak kerugian.



Nikita Willy

Indra Priawan suami Nikita Willy mempunyai rumah di kawasan elite Beverly Hills, Los Angeles. Meski tidak terdampak kebakaran, tapi rumahnya diterpa abu hingga pemadaman listrik akibat peristiwa tersebut.



Nia Ramadhani

Ardi Bakrie suami Nia Ramadhani memiliki rumah di kawasan Beverly Hills, Los Angeles.



Sarah Azhari

Sarah Azhari memiliki rumah di dekat kawasan Hollywood Hills and Sunset. Lokasi rumahnya hanya berjarak 8 kilometer dari lokasi kebakaran. Akibat peristiwa kebakaran itu, Sarah Azhari sempat mengeluhkan aroma terbakar serta kualitas udara yang tidak bagus.



Agnez Mo

Lokasi rumah Agnez Mo di Los Angeles belum diketahui. Kendati demikian, dia bercerita titik api hanya berjarak 15 menit dari rumahnya sehingga harus mengungsi.



Stephanie Poetri

Rumah Stephanie Poetri di Los Angeles juga belum diketahui. Kendati kebakaran dapat disaksikan dari atap, rumah anak TiTi DJ tersebut dikabarkan tidak terdampak kebakaran.

(berbagai sumber, nei)

evakuasi dari otoritas setempat dan sementara ini berada di shelter yang disediakan oleh pemerintah daerah di California Selatan.

Sebelumnya, KJRI juga telah mengeluarkan peringatan dini mengenai potensi kebakaran melalui media sosial.

Informasi ini juga disebarluaskan kepada masyarakat Indonesia di California Selatan melalui berbagai saluran komunikasi, termasuk grup WhatsApp komunitas WNI dan pelajar.

Berdasarkan data terkini, kebakaran ini telah menyebabkan 10 (sepuluh) korban jiwa dan memaksa hampir 180.000 penduduk untuk mengungsi. (AFP/ist/nei)



Sebuah pesawat menjatuhkan bom air untuk mengatasi kebakaran Palisades di Mandeville Canyon, Los Angeles, California, Amerika, Serikat, Sabtu (11/1/2025). Pemerintah setempat memperingatkan akan memburuknya angin Santa Ana yang meningkat pada Sabtu (11/1) malam dan Minggu (12/1/2025) pagi di daerah LA dan Ventura.

Manfaat Makan 2 Kurma Setiap Hari

MANFAAT buah kurma berasal dari beragam nutrisi di dalamnya. Kurma sangat populer di kalangan orang-orang dari segala usia. Anda bisa mengonsumsi makanan ringan yang sehat, manis, dan mudah beradaptasi ini di mana saja dan kapan saja.

Profil nutrisi kurma sangat baik. Mereka memiliki lebih banyak kalori daripada kebanyakan buah segar karena dikeringkan, mengandung serat yang tinggi dan mengandung vitamin dan mineral penting tertentu, meskipun kandungan kalorinya tinggi.

Setidaknya Anda harus makan dua buah kurma setiap hari untuk mendapatkan manfaat terbesar dari buah yang luar biasa ini. Berikut ini adalah enam alasan potensial untuk mengikuti tren ini, dilansir TimesofIndia, Sabtu (11/1/2025).

Meningkatkan energi

Konsumsi kurma bisa meningkatkan energi dengan cepat. Ini karena kurma merupakan sumber fruktosa alami yang cepat diserap oleh tubuh, sehingga bisa memberikan dorongan energi bagi tubuh. Ini sangat bermanfaat untuk mengatasi kelelahan atau ketika tubuh membutuhkan energi instan, seperti setelah berolahraga.

Memperlancar buang air besar

Karena kandungan serat larutnya yang tinggi, kurma mendukung pencernaan yang sehat dan gerakan usus yang teratur.

Menurut penelitian, makan dua buah kurma sehari selama berminggu-minggu dapat meningkatkan frekuensi buang air besar, serat larut kurma melunakkan tinja dengan cara menahan air, sementara serat tidak larutnya menambah volume tinja. Hal ini mengurangi sembelit dan mempercepat transit.

Untuk membantu detoksifikasi lebih lanjut, serat dalam kurma juga mengikat racun seperti amonia di usus besar, mengurangi reabsorpsi dan pengeluarannya melalui tinja.

Kaya akan antioksidan yang memerangi penyakit

Sejumlah antioksidan yang terkandung dalam kurma menawarkan beberapa manfaat kesehatan, seperti kemungkinan lebih

rendah terkena penyakit tertentu.

Sel-sel tubuh dilindungi oleh antioksidan dari radikal bebas, yang merupakan bahan kimia tidak stabil yang dapat merusak tubuh dan menyebabkan penyakit.

Kurma tampaknya memiliki konsentrasi antioksidan tertinggi jika dibandingkan dengan varietas buah lain yang serupa, termasuk buah ara dan plum kering.

Antioksidan kuat yang disebut flavonoid telah diteliti kemampuannya untuk menurunkan risiko diabetes, penyakit Alzheimer, dan beberapa jenis kanker.

Mereka juga dapat membantu mengurangi peradangan. Karotenoid telah terbukti mendukung kesehatan jantung dan dapat menurunkan risiko kondisi yang mempengaruhi mata, seperti degenerasi makula. Kualitas anti-inflamasi asam fenolik dapat membantu mengurangi penyakit jantung.

Membantu mencegah penyakit jangka panjang

Komponen tanaman antioksidan berlimpah dalam kurma. Antioksidan melindungi sel-sel Anda dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh radikal bebas.

Untuk menstabilkan diri mereka sendiri, radikal bebas, yang merupakan perampok sel, mengambil elektron dari sel yang sehat.

Kerusakan sel dan peningkatan risiko penyakit kronis adalah salah satu biaya yang terkait dengan pencurian ini.

Antioksidan membantu menghentikan rangkaian perkembangan penyakit ini karena antioksidan memerangi radikal bebas.

Mengontrol diabetes

Meskipun sangat manis dan tinggi karbohidrat, kurma tetap

dapat diterima oleh penderita diabetes.

Dalam uji coba terkontrol secara acak yang dilakukan pada tahun 2020, sebanyak 100 orang dengan diabetes tipe 2 diminta untuk mengonsumsi tiga buah kurma setiap hari selama 16 minggu. Temuan ini menunjukkan adanya penurunan kolesterol total dan peningkatan kolesterol HDL (baik), yang dapat membantu penderita diabetes tipe 2 untuk menjaga kesehatan jantung yang lebih baik.

Selain itu, karena indeks glikemiknya yang rendah, kurma tidak berpengaruh pada kadar glukosa darah. Akibatnya, penderita diabetes dapat memasukkan kurma ke dalam menu makanan mereka.

Untuk mendapatkan manfaat dari efek menyehatkan jantung dan menurunkan gula darah, ikuti rekomendasi ukuran porsi.

Memperkuat tulang

Karena kurma mengandung banyak mineral, kurma membantu memperkuat tulang dan memerangi kondisi yang melumpuhkan dan menyakitkan seperti osteoporosis.

Di antara banyak mineral lainnya, kurma menga

andung tembaga, mangan, dan selenium, yang memfasilitasi pembentukan tulang yang sehat. Tulang akan menjadi lebih kuat jika makan dua buah kurma setiap hari.

Kulit terlihat lebih muda

Hormon tanaman, juga dikenal sebagai fitohormon, membantu pertumbuhan dan reproduksi tanaman, seperti halnya hormon manusia. Selain itu, mereka dapat membantu kulit terlihat lebih muda. Karena itu, fitohormon kadang-kadang ditemukan dalam produk perawatan kulit.

Kebetulan kurma adalah sumber fitohormon yang bagus. Dalam sebuah uji coba kecil, lima persen ekstrak biji kurma digunakan untuk membuat lotion kulit. Selama lima minggu, wanita paruh baya mengoleskan krim tersebut dua kali sehari ke area sekitar mata mereka.

Kerutan di sekitar mata mereka tidak terlalu dalam dan lebih besar setelah menggunakan krim biji kurma. Meskipun hanya ada sepuluh wanita dalam uji coba tersebut, temuan ini cukup menjanjikan dan bermakna secara klinis. (nei,ist/dya)



Bumi Alami Kepunahan Massal Keenam Akibat Manusia



BUMI pernah mengalami kepunahan massal yang melenyapkan sebagian besar kehidupan, mengubah spesies, bentang alam, dan cuaca, seperti kiamat ratusan ribu tahun lalu.

Saat ini, para ahli menyebut bahwa bumi tengah mengalami kepunahan masalah keenam. Diketahui bumi telah mengalami lima kali kepunahan massal sebelumnya dan yang terakhir terjadi pada 65 juta tahun yang lalu. Berbeda dari kepunahan yang sebelumnya terjadi karena faktor alam, kepunahan yang kini terjadi sebagian besar disebabkan ulah manusia yang merusak lingkungan.

Udara, tanah, dan air yang bersih merupakan bagian tak terpisahkan dari makhluk hidup. Banyak dari kegiatan yang dilakukan manusia disadari atau tanpa disadari telah merusak komponen-komponen tersebut. Melansir dari laman The Wilderness Society ahli ekologi Gerardo Ceballos menyebutkan bahwa apa yang hari ini sedang terjadi adalah akibat dari ulah manusia. Misalnya pengalihan hutan sebagai lahan pertanian, penambahan gas rumah kaca, polusi air, dan lainnya merupakan kondisi yang terjadi hari ini akibat ulah manusia yang tidak bijak mengelola lingkungan. Melansir dari World Wild Life sejumlah peneliti menjelaskan ada beberapa faktor penyebab dunia alami kepunahan massal keenam

Deforestasi

Pembukaan lahan secara besar-besaran untuk pertanian telah

mengakibatkan 40% hutan dunia beralih fungsi, yang berisiko mengancam keberagaman hayati dan kelangsungan hidup berbagai spesies. Ironisnya, meskipun sebagian besar hutan yang digunduli digunakan untuk lahan pertanian, hal ini justru mengancam ketahanan pangan di masa depan. Selain itu, deforestasi memperburuk krisis air tawar dan meningkatkan suhu atmosfer, yang memberikan dampak luas bagi ekosistem dan spesies di bumi. Negara-negara dengan tingkat deforestasi tertinggi adalah Brazil, Republik Demokratik Kongo, dan Indonesia.

Pencemaran Air dan Tanah

Polusi tanah yang parah disebabkan oleh erosi tanah yang terjadi 100 kali lebih cepat

dibandingkan proses alami. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dalam pertanian merusak struktur tanah, mempermudah terjadinya erosi, dan mencemari air tanah. Air tanah sangat penting sebagai sumber air minum dan kebutuhan sehari-hari manusia. Dengan tercemarnya air tanah dan kerusakan tanah, dampaknya bisa sangat merugikan bagi kehidupan manusia dan lingkungan.

Mencairnya Tutupan Es

Mencairnya lapisan es di kutub menyebabkan kenaikan permukaan air laut, yang mengancam kehidupan di wilayah pesisir. Kenaikan air laut yang terus menerus berpotensi membanjiri wilayah yang dihuni oleh ratusan juta orang. Saat ini, rata-rata permukaan air laut meningkat sekitar

3,2 mm per tahun. Dampak dari mencairnya es ini sudah terasa, dan diperkirakan akan terus memburuk seiring berjalannya waktu, membahayakan ekosistem pesisir dan keberlangsungan hidup manusia di wilayah tersebut.

Penyebaran Virus Penyakit

Penyebaran virus penyakit, seperti yang terjadi pada pandemi Covid-19, dapat menyebabkan kematian massal dan menyebar dengan cepat antarnegara. Virus juga telah menjadi penyebab kematian massal pada manusia dan hewan sejak lama, seperti pada virus Nipah yang menyerang Malaysia dan Australia, yang menewaskan ratusan orang. Virus-virus ini bukan hanya ancaman kesehatan manusia, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem karena mempengaruhi populasi hewan.

Secara keseluruhan, tingkat kepunahan spesies saat ini diperkirakan 1.000 hingga 10.000 kali lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kepunahan alami. Proses ini sangat mengancam stabilitas ekosistem, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, sangat penting untuk melaksanakan upaya-upaya yang mendukung kestabilan iklim, keberagaman hayati, serta produksi pangan yang ramah lingkungan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada planet ini. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

ATASI

Wajah Bengkak saat Bangun Tidur

WAJAH bengkak saat bangun tidur adalah hal yang sangat umum terjadi. Kondisi ini paling sering disebabkan oleh konsumsi makanan tinggi garam atau alkohol di malam sebelumnya. Namun, wajah bengkak juga bisa disebabkan oleh posisi kepala saat tidur, perubahan hormon, stres, dehidrasi, dan alergi.

Seringkali kita ingin bangun tidur dengan keadaan segar dan tidak ada masalah. Namun, terkadang wajah bengkak menjadi masalah yang cukup merepotkan, khususnya bagi para perempuan yang langsung cenderung merasa "gendutan". Padahal, wajah bengkak di pagi hari menjadi hal wajar loh.

Dilansir dari Medical News Today, bengkaknya wajah di pagi hari bisa disebabkan oleh banyak faktor. Mulai dari posisi tidur, terlalu banyak konsumsi sodium, hingga menstruasi. Sehingga, wajah bengkak tersebut sebenarnya bersifat sementara.

Nah, masalah ini sebenarnya bisa diatasi dengan cukup mudah. Berikut beberapa tips yang dilansir dari Beautylish untuk membantumu menghilangkan wajah bengkak di pagi hari. Yuk, simak sama-sama.

1. Air dingin atau es batu

Cara satu ini cukup mudah untuk kamu terapkan mengingat kita tidak membutuhkan begitu banyak alat bantuan. Saat kamu merasa wajahmu bengkak, cobalah basuh wajah dengan air dingin atau pijat dengan bantuan es batu.

Air dengan suhu dingin dipercaya dapat membantu mengencangkan pori-pori, membuang racun, mengurangi peradangan, dan berbagai

masalah lainnya yang memicu wajah menjadi bengkak.

2. Minum air putih

Bukan hanya membasuh wajah dengan air, namun kamu juga disarankan untuk memenuhi kebutuhan cairan harian karena air putih disebut dapat menyeimbangkan kadar garam dan cairan dalam tubuh kita.

Salah satu faktor pemicu wajah bengkak adalah tubuh menahan air untuk mencegah dehidrasi. Jadi, cobalah untuk mulai rajin minum air putih, setidaknya delapan gelas perhari.

3. Menggunakan masker kafein

Yup, kamu tidak salah dengar. Saat ini, kamu tidak diminta untuk mengonsumsi kopi ataupun teh, melainkan menggunakan masker yang mengandung kafein saat wajahmu mengalami bengkak.

Namun, mengingat masker berbahan kafein belum semudah itu untuk ditemukan, kamu bisa membuatnya sendiri dengan mencampurkan bubuk kopi dengan pelarut yang bersifat nonkomedogenik.

4. Gunakan gua sha atau roll wajah

Gua sha diciptakan untuk menjadi alat yang membantu kita memijat area wajah dan sekitar leher untuk mengurangi beberapa keluhan pada tubuh, salah satunya wajah bengkak.

Memijat menggunakan gua sha dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah sehingga mengurangi potensi kembung dan pembengkakan

pada wajah. Tapi, jangan lupa untuk lakukan juga secara rutin ya, Ladies!

5. Rutin gunakan masker wajah

Beberapa jenis masker memang dibuat untuk membantu mengurangi bengkak pada wajah. Tidak hanya yang mengandung kafein,

masker dengan kandungan mentimun, magnesium, atau bahan lainnya yang memiliki efek mendinginkan juga dapat membantu mengencangkan wajah lebih cepat. Maka dari itu, rutin menggunakan masker wajah dapat membantu mencegah bengkak yang terlalu parah.

6. Kompres wajah dengan air hangat

Setelah air dingin, kamu juga bisa mengompres wajah dengan air hangat, lho. Mengompres wajah dengan air hangat bermanfaat untuk melancarkan aliran cairan yang menumpuk di wajah. Namun, hindari mengompres area sekitar mata, ya.

Penyebab muka bengkak saat bangun tidur

Melansir dari berbagai sumber, inilah beberapa penyebab muka bengkak saat bangun tidur.

1. Retensi cairan

Salah satu penyebab paling umum dari muka yang bengkak saat bangun tidur adalah retensi cairan. Selama tidur, tubuh manusia cenderung mempertahankan lebih banyak cairan di beberapa area tubuh, terutama karena perubahan posisi tubuh saat istirahat. Cairan ini dapat terkumpul di wajah, sehingga menyebabkan

pembengkakan, terutama di area sensitif seperti di sekitar mata dan pipi

2. Alergi

Reaksi alergi terhadap zat-zat tertentu juga menjadi penyebab umum muka bengkak saat bangun tidur. Zat alergen seperti debu, bulu binatang, serbuk sari, atau bahan kimia dalam kosmetik dapat memicu respons tubuh berupa pelepasan histamin. Histamin ini menyebabkan pembengkakan, kemerahan, atau rasa gatal pada wajah.

3. Konsumsi garam berlebihan

Mengonsumsi makanan yang tinggi garam, terutama menjelang waktu tidur, dapat meningkatkan risiko retensi cairan dalam tubuh. Garam yang berlebihan menyebabkan tubuh menahan lebih banyak air, termasuk pada jaringan wajah, sehingga menghasilkan pembengkakan yang terlihat saat bangun pagi.

Contoh makanan yang tinggi kandungan garam meliputi makanan olahan, makanan ringan, atau makanan cepat saji. Untuk mengurangi risiko ini, penting untuk memperhatikan asupan garam harian dan memilih makanan yang lebih sehat. Selain itu, menjaga keseimbangan dengan minum cukup air sepanjang hari dapat membantu mengurangi efek retensi cairan akibat konsumsi garam. Dengan menjaga pola hidup sehat, termasuk pola makan, kebersihan, dan rutinitas tidur, Anda dapat mencegah atau mengurangi masalah muka bengkak saat bangun tidur. (nei,ist/dya)

Tumpukan Sambatan ... (dari Hal 1)

KETUA Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah untuk mengantisipasi defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan mencapai Rp20 triliun pada 2024.

Menurutnya, defisit ini dapat berlanjut di tahun-tahun mendatang jika tidak segera diatasi, bahkan berisiko memicu gagal bayar. Salah satu solusi yang direncanakan adalah menaikkan iuran peserta pada Juli 2025, namun langkah tersebut dinilai Saleh kurang tepat dan berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Menaikkan iuran tentu alternatif kurang populis. Faktanya, dengan iuran saat ini saja banyak masyarakat yang sudah kesulitan membayar," ujarnya, dikutip Minggu (12/1/2025).

Ia menjelaskan, peningkatan utilisasi layanan kesehatan di rumah sakit menjadi penyebab utama defisit, karena semakin banyak pasien yang memanfaatkan layanan BPJS. Namun, disiplin peserta dalam membayar iuran masih rendah, sehingga memperburuk kondisi keuangan BPJS Kesehatan.

Saleh juga mengkritik kenaikan iuran yang dinilai bertentangan dengan program pemerintahan Prabowo-Gibran yang fokus pada pengurangan beban masyarakat. Ia meminta pemerintah mencari solusi strategis agar pelayanan BPJS tetap berjalan baik tanpa membebani rakyat.

"Jumlah kepesertaan sudah mencapai lebih dari 98 persen dengan kepercayaan publik yang semakin tinggi. Jangan sampai pelayanan menurun karena anggaran yang tidak seimbang," katanya.

Sorotan terhadap BPJS Kesehatan memang menjadi topik panas di lini masa media sosial. Salah satu yang teranyar soal stok obat yang sering kosong.

Lini masa media sosial Instagram ramai membahas unggahan soal kenapa stok obat pasien BPJS Kesehatan sering kosong. Unggahan itu diposting oleh @mood.jakarta pada Kamis (9/1/2025). "Dok, kalau pakai BPJS kok obatnya kosong2 terus?" tulis unggahan tersebut.

Dalam unggahan yang awalnya viral di TikTok itu, disebutkan bahwa alasan stok obat pasien BPJS Kesehatan sering kosong adalah karena pembayaran klaim BPJS Kesehatan ke rumah sakit seringkali tidak tepat waktu.

Keterlambatan dan ketidakjelasan pembayaran itulah yang kemudian disinyalir sebagai penyebab obat pasien BPJS Kesehatan sering kosong.

Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat BPJS Kesehatan, Rizcky Anugerah membantah narasi tersebut. Dia

memastikan, ketersediaan obat bukan sepenuhnya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan. "Tanggung jawab tersebut tidak hanya berada pada satu entitas, melainkan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan fasilitas kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing," kata Rizcky.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, khususnya pada Pasal 58. Dijelaskan bahwa terdapat pembagian tanggung jawab dalam memastikan ketersediaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Rizcky juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak pernah menolak klaim obat yang diajukan rumah sakit.

"Perlu kami sampaikan juga bahwa BPJS Kesehatan tidak pernah menolak klaim yang diajukan rumah sakit dengan alasan tidak memiliki cukup dana untuk membayar klaim tersebut," tegas dia.

Rizcky berpendapat, seluruh klaim yang diajukan rumah sakit ke BPJS Kesehatan akan diproses sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Bagaimana jika stok obat pasien BPJS Kesehatan kosong? Lebih lanjut, Rizcky menyampaikan bahwa setiap peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masih berstatus aktif dan telah mengikuti prosedur yang berlaku dapat menerima manfaat tebus obat gratis.

Namun, apabila ketersediaan obat pasien BPJS Kesehatan tidak ada atau kosong, peserta JKN bisa menyampaikan laporan ke BPJS Kesehatan. "Laporkan melalui berbagai kanal yang disediakan untuk melakukan pengaduan dan permintaan informasi," kata dia.

Selanjutnya, BPJS Kesehatan akan melakukan koordinasi dengan fasilitas kesehatan yang bersangkutan agar permasalahan tersebut dapat cepat ditangani.

Keluhan lainnya terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan juga sempat ramai diperbincangkan di salah satu aplikasi X (dulu bernama Twitter). Aturan baru yang diberlakukan BPJS Kesehatan membuat netizen berpikir untuk memilih gunakan asuransi milik swasta. Ini lantaran BPJS Kesehatan merilis ada 144 penyakit yang diklaim tidak bisa langsung dirujuk ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL).

Nantinya, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang didiagnosis terkena penyakit tersebut mau tidak mau harus mendapatkan pengobatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

Selain keluhan-keluhan tersebut, hal lain turut mendapat sorotan masyarakat adalah adanya

pernyataan pegawai BPJS Kesehatan yang mengaku menggunakan asuransi swasta untuk berobat. Meski tidak menyebutkan nama pegawai, akun tersebut mengaku menggunakan asuransi non-BPJS Kesehatan karena kecepatan pelayanan.

UU Larang Diskriminasi

Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, melihat banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan BPJS Kesehatan itu karena ketidakpuasan terhadap layanan diberikan baik di FKTP maupun rumah sakit. Sebab, berdasarkan aduan diterima BPJS Watch sengkabut pelayanan rumah sakit yang buruk terhadap peserta BPJS Kesehatan dilakukan secara beragam.

Timboel mencontohkan, mulai dari obat yang seharusnya dikasih untuk 30 hari menjadi hanya tujuh hari. Kemudian banyak pasien yang belum layak pulang, justru disuruh pulang setelah mendapatkan perawatan tiga sampai empat hari di rumah sakit. Belum lagi, ada item-item kesehatan lain yang dibebankan atau disuruh beli secara mandiri.

"Jadi persoalannya memang bagaimana terkait dengan pelayanan ya menurut saya itu memang harus benar-benar yang menjalankan pengawasan," ujar Timboel, beberapa waktu lalu.

Timboel menekankan, memang seharusnya ini menjadi tanggungjawab pemerintah atau BPJS Kesehatan untuk melakukan upaya pengawasan di lapangan. Karena menurutnya tidak semua rumah sakit itu adalah 'malaikat'. Banyak juga rumah sakit-rumah sakit yang cenderung nakal dan melakukan diskriminatif terhadap peserta aktif BPJS Kesehatan.

Padahal jelas, kata Timboel dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, tidak boleh diskriminasi. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga disebutkan dilarang diskriminasi terhadap pasien. Artinya keselamatan pasien harus didahulukan tidak memandang ia merupakan peserta BPJS maupun bukan.

"Tapi kan faktanya suka terjadi diskriminasi. Nah itu kan semuanya perilaku rumah sakit. Jadi memang ada peran serta BPJS yang mengawal itu. BPJS tugasnya juga melakukan pengawasan, menerima laporan, keluhan daripada pasien," jelas dia.

Namun, dalam hal urusan pelayanan, pemerintah menjamin tidak akan membeda-bedakan pasien. Lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) aturan itu mengamanatkan pelayanan kesehatan peserta BPJS Kesehatan berlaku Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Tujuan perpres ini adalah

menjamin masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan agar mendapatkan perlakuan yang sama. Perlakuan yang sama tersebut di antaranya melalui sarana dan prasarana untuk ruang rawat inap yang disebut dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Setidaknya ada 12 komponen yang harus dipenuhi oleh fasilitas kesehatan untuk mencapai KRIS. Sebagian fasilitas kesehatan sudah memenuhi 12 kriteria tersebut tetapi masih ada yang belum memenuhi kriteria tersebut. Implementasi ini pun masih dalam proses.

Sementara untuk sampai dengan 1 Juli 2025, sistem kelas rawat inap di rumah sakit di Indonesia untuk peserta BPJS Kesehatan masih dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3.

Terkait 144 penyakit yang terdaftar sebagai jenis penyakit yang tidak bisa dirujuk ke tingkat fasilitas kesehatan (faskes) lanjutan, setidaknya bisa dikategorikan menjadi tiga jenis yakni kesehatan reproduksi dan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular. Tiga jenis penyakit ini dikategorikan oleh WHO dalam kerangka kerja 'Tracking Universal Health Coverage: Global Monitoring Report' sebagai tiga dari empat indikator keberhasilan dalam mencapai kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC).

"BPJS selaku lembaga pemerintah yang menyelenggarakan JKN mesti berhati-hati dalam pengelolaannya," kata Peneliti Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) bidang Kesehatan Publik, Nuri Ikawati.

Berdasarkan laporan WHO dalam Tracking Universal Health Coverage: Global Monitoring Report (2023) skor Indonesia untuk penanganan penyakit menular yaitu TBC dan HIV-antiretroviral therapy sangat rendah, yakni hanya 45 dan 28, sedangkan untuk penyakit tidak menular yang diklasifikasikan menjadi penanganan terhadap hipertensi, diabetes dan pengendalian perilaku merokok Indonesia mendapatkan skor 19, 80 dan 46 secara berurutan.

Secara lebih spesifik, kata Nuri, beberapa provinsi di Indonesia berkontribusi terhadap rendahnya skor ini terutama provinsi dengan sumber daya kesehatan baik fasilitas, fiscal capacity, tenaga kesehatan dan tingkat sanitasi dasar maupun stok obat-obatan yang terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk bisa secara efektif menanganinya di tingkat kesehatan pertama.

"Oleh sebab itu, kebijakan untuk membatasi rujukan pasien dengan gejala penyakit - penyakit tersebut justru akan memperparah penanganan lebih lanjut. Hal ini juga kontraproduktif dengan upaya untuk meraih pembangunan kesehatan semesta seperti yang telah dicanangkan melalui JKN," jelas Nuri. (din, wid, tir, ist/dya)

KPK Bicara **Peluang Tahan Hasto** usai Pemeriksaan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan langsung menahan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto usai pemeriksaan pada Senin (13/1/2025). Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut potensi penahanan Hasto itu bisa terjadi bila alat bukti sudah dinyatakan lengkap.

"Kita tunggu apakah sudah cukup kecukupan alat buktinya dan lain-lainnya (untuk ditahan), tinggal kita tunggu," kata Asep dikutip Minggu (12/1/2025).

Di sisi lain Hasto juga mengajukan permohonan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK itu. Penjabat Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan permohonan praperadilan itu telah diterima pada Jumat (10/1/2025).

Permohonan praperadilan Hasto itu diregister dengan nomor perkara No 5/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel. PN Jaksel pun menunjuk hakim tunggal Djuyamto untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut.

Adapun sidang pertama bakal digelar pada Selasa (21/1/2025) dengan agenda pemanggilan para pihak telah ditetapkan.

Menyikapi upaya praperadilan itu, KPK menyatakan siap melawan. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan pihaknya juga menghormati upaya hukum yang diambil Hasto itu.

"KPK menghormati upaya hukum yang dilakukan oleh pihak tersangka HK dan KPK melalui biro Hukum akan menghadapi dan mengawal proses praperadilan tersangka HK," kata Tessa.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya yakin Hasto tidak akan menang praperadilan seperti Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor atau Paman Birin. Asep mengatakan Hasto sudah diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut sebelum ditetapkan menjadi tersangka.

"Jadi begini, perkara Pak HK ini merupakan pengembangan penyidikan dari perkaranya Pak Harun Masiku. Jadi, kalau pengembangan penyidikan itu tentunya sudah dilakukan pemanggilan yang bersangkutan (Hasto) sebagai saksi," kata Asep.

Asep mengatakan Paman Birin menang praperadilan sehingga status tersangkanya gugur karena belum dipanggil sebagai saksi sebelum penetapan tersangka. Sebab, kata Asep, perkara Paman Birin dimulai dari operasi tangkap tangan (OTT).

Sementara itu, dia mengatakan kasus dugaan suap pergantian



Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Acara Soekarno Run, Kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Minggu (12/1/2025). (Ist)

antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menjerat Hasto merupakan pengembangan perkara. Dia mengatakan pemeriksaan calon tersangka sampai saksi lain sudah dilakukan.

"Kemudian, saksi-saksi yang lain sudah dipanggil juga," ujarnya.

Pengacara: Tak Memiliki Urgensi

Anggota tim kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, merespons pernyataan dari penyidik lembaga antirasuah itu. Menurut dia, upaya penahanan langsung itu tidak memiliki urgensi.

"Kalau KPK hanya menggunakan alasan subyektif penyidik, maka penahanan tersebut telah dilakukan tidak menurut hukum," kata Maqdir Minggu (12/1/2025).

Terlebih lagi, ujar dia, Hasto telah mengajukan praperadilan ke pengadilan negeri untuk menggugat penetapan status tersangkanya oleh KPK. Dia menilai, semestinya penyidik KPK legowo dan tidak melakukan pemeriksaan hingga ada putusan praperadilan.

"Menurut hemat saya, penyidik

seharusnya bersabar dalam menangani perkara ini," ucapnya.

Dia berujar bahwa sikap bersabar itu sebagai bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang diajukan oleh tersangka. Sebab, dia mengatakan bila pengadilan menyatakan penetapan tersangka tidak sah, maka penyidik harus menghentikan proses penyidikan. (din, rla, ant/dya)

PERAN PARA TERSANGKA DI KASUS HARUN MASIKU



Hasto Kristiyanto

- Ikut menyumbang uang suap untuk Wahyu Setiawan.
- Meminta Rizki Aprilia mundur.
- Bersama-sama Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah untuk menyuap Wahyu dan Agustiani Tio
- Merintang penyidikandengan meminta Harun merendam HP
- Meminta saksi tak memberikan keterangan yang benar.



Donny Tri Istiqomah

- Menjadi utusan Hasto melobi KPU untuk menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih.
- Mengantar duit suap ke Wahyu Setiawan.
- Menyusun kajian hukum Pelaksanaan Putusan MA Nomor 57P/HUM/2019 sebagai landasan PAW Harun Masiku.



Wahyu Setiawan

- Menerima suap total Rp600 juta.
- Memfasilitasi Harun Masiku dan PDIP untuk bertemu serta melobi komisioner KPU.



Agustiani Tio Fridelina

- Menjadi utusan PDIP dalam melobi Wahyu Setiawan serta komisioner KPU lainnya.
- Menyiapkan uang Rp850 juta agar bisa melenggang ke senayan.



Saeful Bahri

- Menyuap Agustiani Tio Fridelina dan Wahyu Setiawan



Harun Masiku

- Menyuap Wahyu Setiawan & menyiapkan uang Rp850 juta agar bisa melenggang ke Senayan.

'Saya Ikuti Seluruh Proses Hukum'

SEKRETARIS Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan akan mengikuti seluruh proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto akan mendatangi Gedung KPK pada Senin (13/1/2025), untuk memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka dugaan suap Harun Masiku.

"Jadi saya akan hormati seluruh proses, akan ikuti seluruh proses dengan penuh keyakinan," kata Hasto di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Hasto mengaku siap menghadapi pemeriksaan oleh KPK esok hari. Pasalnya, perkara yang menimpanya sudah berlangsung sejak lama. "Dan sesuai dengan komitmen saya akan taat sepenuhnya pada seluruh proses hukum. Hukum yang berkeadilan," ujar dia.

Di lain sisi, Hasto sudah mempelajari hak-haknya sebagai tersangka. Ia juga sudah mengajukan permohonan praperadilan atas status tersangkanya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Jumat lalu. "Saya punya kewajiban-

kewajiban, bahkan saya juga sudah membaca hak-hak saya dalam status sebagai tersangka. Hak sebagai tersangka apa saja itu sudah saya pelajari dengan sebaik-baiknya," beber Hasto.

Sementara, Politikus PDIP Aria Bima merespons soal KPK yang meyakini akan memenangi praperadilan melawan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kasus Harun Masiku. Aria Bima meminta KPK tidak membuat opini.

"Saya kira KPK tidak perlu membuat opini. Apalagi juru bicara. KPK laksanakan saja tahapan-tahapan hukumnya. Tidak membuat opini-opini ke masyarakat," kata Aria di GBK, Jakarta, Minggu (12/1/2025).

Aria mengatakan dikabulkan atau tidaknya praperadilan adalah keputusan hakim. Dia meminta agar KPK tidak mendahului hal tersebut.

"Yakin tidak adanya nanti ada di fakta peradilan. Yakin tidaknya nanti ada di keputusan hakim. Juga di jaksa. Juga kemudian di saksi maupun di pembela kami. Jadi saya berharap KPK bertindak secara profesional,"

ucap dia.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menyebut dirinya menghormati hak-hak dari KPK. Sejalan, kata dia, KPK juga harus menghormati hak dari Hasto. (ist, din, ant/dya)